



Candra Dituntut

15 Tahun

Juga Dilucuti Hak Politiknya

DENPASAR - Mantan Bupati Klungkung Wayan Candra, dituntut pidana penjara selama 15 tahun. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Klungkung menilai, lelaki berusia 51 tahun itu telah melakukan korupsi senilai Rp 42.628.467.605 (dari jumlah itu Rp 9,5 miliar adalah kerugian keuangan negara). Seluruh uang itu dianggap tidak sah, karena diduga hasil dari korupsi pengadaan lahan Dermaga Gunaksa dan sejumlah penerimaan yang disebut sebagai gratifikasi alias suap.

"Menuntut majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar menghukum terdakwa Dr. Wayan Candra, SH. MH., penjara selama 15 tahun," tandas jaksa Azman Tanjung dkk.

Selain hukuman badan, jaksa juga meminta majelis hakim yang diketuai Hasoloan Sianturi menjatuhkan denda Rp 500

juta subsider 6 bulan kurungan. Tak cukup di sana, jaksa juga menuntut agar Candra mengembalikan uang pengganti senilai Rp 42,6 miliar sesuai yang diterima Candra selama menjabat sebagai Bupati Klungkung 2003-2013. Serta menghukum terdakwa dengan mencabut hak politik terdakwa untuk dipilih dalam jabatan politiknya.

Dijelaskan, sedikitnya ada delapan hal yang memberatkan dalam tuntutan untuk Candra ini. Menanggapi tuntutan berat dari jaksa, Candra yang dalam sidang itu mengenakan baju putih berbalut jaket kulit warna hitam serta bercelana panjang hitam ini setelah berkonsultasi dengan pengacaranya Warsa T. Bhuana menyatakan akan mengajukan pembelaan pekan depan.

"Tuntutan ini paling berat di antara mantan-mantan bupati di Bali. Bahkan, ada pencabutan hak dipilih. Ada dendam apa ini?" kata Warsa usai sidang. (yor/han)

Edisi : Kamis, 11 Juni 2015

Hal : 24



Radar Bali

Dewan Bali Soroti Tingginya Silpa APBD 2014



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

PAPARKAN DANA: Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, menyampaikan pertanggungjawaban APBD kepada DPRD Bali.

DENPASAR -Tingginya nilai sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun 2014 mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali. Ini ditegaskan salah satu anggota Komisi II DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana. Dikatakan, meski dari sisi pendapatan mengalami peningkatan, namun dari sisi serapan anggaran, Adhi Ardhana masih menyatakan sangat rendah.

"Secara umum kami mengapresiasi dengan peningkatan pendapatan yang dicapai Pemprov Bali dalam pengelolaan keuangan, namun dari sisi serapan, tingginya Silpa yang hamper mencapai sepuluh persen harus diwaspadai,"terang Adhi Ardhana saat dikonfirmasi usai mengikuti rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Kepala Daerah terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali tahun Anggaran 2014, dan Raperda tentang Jasa Konstruksi di Ruang Sidang Utama kantor DPRD Provinsi Bali, Renon, Denpasar, kemarin (10/6).

Lebih lanjut, politisi PDIP asal Kota Denpasar ini menambahkan, dengan masih tingginya Silpa yakni sebesar Rp 905.742.777.163,47 atau Rp 905,7 miliar lebih, pihaknya mendorong agar kedepan, Pemprov Bali mampu memperbaiki dan mendesain penganggaran. "Kedepan, desain penganggaran harus ditelaah, termasuk dalam perencanaan program yang tidak bertumpu pada project semata. Sehingga kejadian gagal program dan rendahnya serapan anggaran tidak terulang," tandasnya.

memang, yang menjadi catatan adalah dengan masih kurang meratanya SDM di lingkungan Pemprov," tambahnya. Untuk itu, pihaknya men-

dorong, dalam upaya pemerataan dan kebutuhan, gubernur mampu melakukan pemerataan sesuai dengan kebutuhan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, mewakili Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan untuk mengapresiasi realisasi anggaran Tahun 2014 yang rata-rata capaiannya di atas 80 persen. Disebutkan, posisi aset pada Neraca per 31 Desember 2014 mengalami peningkatan Rp. 327.545.223.137,92 atau 5,38 persen dari jumlah aset pada Neraca per 31 Desember 2015 yang juga membawa dampak positif pada peningkatan Ekuitas Dana Tahun 2014 sebesar Rp. 249.297.791.922,64 atau 4,26 persen dari Ekuitas Dana Tahun 2013. (adv)

Edisi : Kamis, 11 Juli 2015

Hal : 23



Radar Bali

KASUS PD PARKIR-PERDIN

Hari Ini, Sekwan Kota Dipanggil

KEJARI Denpasar di bawah kendali Kajari Imanuel Zebua terus menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengelolaan PD Parkir Kota Denpasar. Sejumlah pejabat, dari kelas kepala bagian (kabag) dan kepala seksi (kasi) sudah diperiksa secara bergantian dalam beberapa hari belakangan ini. Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir menjelaskan dua pejabat PD Parkir Denpasar ini adalah Kepala Seksi (Kasi) Pelaporan dan Pengaduan Ketut Ngurah Adnyana, dan Kasi Pengawasan dan Pengamanan I Made Ardana. Selain masalah PD Parkir Denpasar, pihaknya juga kembali mengusut dugaan korupsi perjalanan dinas (perdin) di Sekretariat DPRD Denpasar. Dikatakan, kemarin satu orang pejabat kembali diperiksa. Yakni Kasubag Antarlembaga DPRD Denpasar Gede Wira Kusuma yang diperiksa tambahan karena sebelumnya pernah diperiksa. "Untuk perjalanan dinas DPRD Denpasar, besok (Kamis ini, Red) juga dipanggil sekwan (sekretaris DPRD Denpasar, I Gusti Rai Suta) sebagai kuasa pengguna anggaran," tukasnya. (yor/han)

Edisi : Kamis, 11 Juni 2015

Hal : 24